

## **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH**

**Maulkre Her Susilo<sup>1</sup>, Prima Prihatini<sup>2</sup>, Muhammad Sobri<sup>3</sup>, Rina Rupiah<sup>4</sup>,  
Ririh Sekar Handini<sup>5</sup>, Siti Antasari<sup>6</sup>**

<sup>134</sup>Sekolah Tinggi Manajemen IMMI

<sup>256</sup>Universitas Sahid Surakarta

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Hakekat pembangunan nasional menurut Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta nasional serta mertipakan konsekuensi dan kornitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. (Propenas 2015-2019)

Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas 2016-2019).

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pertengahan 1997, pembangunan di Indonesia terhenti karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang disebabkan pendapatan pernerintah berkurang, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Krisis ekonomi telah berhasil memunculkan kepermukaan beberapa kelemahan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi. Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara mamadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk

memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

## METODE PENELITIAN

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur – literatur dan buku – buku yang mendukung. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2020.
- c. Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisa yang berdasarkan data dan dinyatakan dalam bentuk uraian. Data ini merupakan data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada.

#### 2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas ( jumlah dan angka ). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

#### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS ( Ordinary Least Square ), yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independent terhadap variabel dependen, maka model penelitian ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots \dots \dots (3.1)$$

Secara pengertian ekonomi, penjelasan fungsi matematis diatas adalah bahwa penerimaan pemerintah daerah (Y) akan dipengaruhi oleh jumlah transfer pemerintah pusat (X1), jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (X2), jumlah kendaraan roda 2 (X3) dan jumlah investasi pemerintah daerah pada BUMD (X4).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Operasional

Variabel Dependen dalam penelitian ini yang masuk dalam variabel dependen adalah pendapatan asli daerah ( PAD ). PAD adalah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber – sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi – potensi sumber – sumber keuangan untuk membiayai tugas – tugas dan tanggung jawabnya ( Sutrisno PH, 1982 ).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena pendapatan asli daerah digunakan untuk

membiayai kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi di suatu daerah, oleh karena itu pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dapat pula mempengaruhi produksi nasional, pendapatan asli daerah diperoleh dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba dari BUMD (Hasil Investasi)

Variabel pendapatan asli daerah dinotasikan dengan simbol ( Y ).

Variabel-variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang masuk ke Kas Daerah baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah, sumbangan pihak ketiga dan hasil usaha daerah serta penerimaan lainnya yang menjadi hak daerah dan merupakan potensi daerah.
2. Transfer dari pemerintah pusat yaitu penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat guna pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagai tangan panjang dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Transfer dari pemerintah pusat terdiri dari : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta penerimaan lainnya yang sah (Dana Penyeimbang). Transfer dari pemerintah pusat atau disebut juga dengan perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yaitu jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang domisili pemiliknya berada di wilayah otonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terkait dengan pajak atas kepemilikan kendaraan roda 4 atau lebih yang dipungut oleh pemerintah daerah dan masuk ke Kas Daerah baik yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan sumbangan pihak ketiga dealer atas kendaraan roda 4 atau lebih yang baru.
4. Yang dimaksud dengan jumlah kendaraan roda 2 yaitu jumlah kendaraan roda 2 yang domisili pemiliknya berada di wilayah otonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terkait dengan pajak atas kepemilikan kendaraan roda 2 yang dipungut oleh pemerintah daerah dan masuk ke Kas Daerah baik yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan sumbangan pihak ketiga dealer atas kendaraan roda 2 yang baru.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu dana pemerintah daerah yang dialokasikan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui bagian labanya.

#### **Keadaan APBD Provinsi Jawa Barat**

Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya dapat dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara maksimal dan optimal agar lebih mandiri dan tidak selalu mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Terlebih lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah

yang dicanangkan sejak tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mampu memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki secara optimal agar dapat melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan melalui struktur APBD.

APBD merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan keputusan, peraturan atau pedoman menteri dalam negeri yang disesuaikan dengan rencana strategis daerah yang telah disusun agar pembangunan di daerah dapat sejalan dengan program pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Penyusunan APBD harus mengacu pada ketentuan yang ada dengan maksud agar dalam penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban serta pelaporan terhadap pelaksanaannya dapat dengan mudah dipantau serta dievaluasi demi perbaikan pelaksanaan kedepan, oleh karena itu pelaksanaan APBD harus transparan dan akuntabel.

### Interpretasi Hasil

#### a. Pengaruh Variabel Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hasil signifikan secara tidak langsung, khususnya transfer yang digunakan untuk membiayai pembangunan infra struktur dan aktivitas ekonomi, sehingga mendorong kegiatan perekonomian di Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan PAD. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,659 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat signifikan secara tidak langsung terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tingginya jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat menyebabkan tingkat kemandirian daerah semakin baik, karena semakin tinggi PAD, transfer yang dialokasikan dalam APBD semakin kecil dibandingkan dengan PAD.

#### b. Pengaruh Variabel Jumlah Kendaraan Roda 4 atau Lebih.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah kendaraan roda 4 atau lebih terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat menunjukkan hasil yang signifikan, hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dari luar Provinsi Jawa Barat, sehingga masyarakat di Jawa Barat bergairah membeli kendaraan luar Jawa Barat yang harga pasarannya lebih rendah untuk dimutasikan ke Jawa Barat. Walaupun BBNKB II dari kendaraan luar daerah nihil, tetapi pajak kendaraannya masuk ke kas daerah provinsi Jawa Barat, hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,535 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 4 atau lebih akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Jadi dapat dikatakan jika semakin banyak jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang ada di Jawa Barat, maka pendapatan asli yang diperoleh Provinsi Jawa Barat akan semakin besar, karena pajak kendaraan bermotor roda 4 yang disetor ke kas daerah semakin besar.

#### c. Pengaruh Variabel Jumlah Kendaraan Roda 2.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah kendaraan roda 2 terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,140 dan Angka probabilitas signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 2 atau lebih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Hal ini yang menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 2 akan berdampak pada

peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Jadi dapat dikatakan jika semakin banyak jumlah kendaraan roda 2 yang ada di Jawa Barat, maka pendapatan asli yang diperoleh Propinsi Jawa Barat akan semakin besar, hal ini juga disebabkan karena adanya kebijakan pembebasan BBNKB II dari luar Jawa Barat, sehingga pajak kendaraan bermotor roda 2 yang disetor ke kas daerah semakin besar.

d. Pengaruh Variabel Investasi Daerah.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara investasi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,595 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Hal ini yang menjelaskan bahwa semakin tinggi investasi daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat atau dapat dikatakan jika semakin banyak investasi daerah yang dialokasikan dari APBD, maka pendapatan asli yang diperoleh Propinsi Jawa Barat akan semakin besar, karena deviden dari hasil investasi daerah yang disetor ke kas daerah semakin besar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. dengan koefisien regresi sebesar (2,440) dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat walaupun secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Koefisien regresi sebesar 2,859 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, dan dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 jumlah kendaraan roda 4 atau lebih maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,859 juta.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda 2 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Koefisien regresi sebesar 0,505 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 2 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, dan dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 2 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 2, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 jumlah kendaraan roda 2 maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,505 juta.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Koefisien regresi sebesar 1,350 menunjukkan bahwa variabel investasi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, dan dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi investasi daerah, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 juta investasi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,350 juta.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran guna meningkatkan PAD, yaitu :

1. Pemerintah daerah agar berusaha untuk mendapatkan bagi hasil dari pusat terkait sumberdaya daerah yang penerimaannya disetor seluruhnya ke pusat, sebagai contoh bagi hasil cukai yang semuanya merupakan penerimaan pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah agar mempertahankan kebijakan yang telah ditempuh yaitu pembebasan BBNKB II yang berlaku selamanya tidak temporer, sehingga kendaraan dari luar Jawa Barat yang mutasi ke Jawa Barat semakin meningkat.
3. Membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor khususnya kendaraan bekas, sehingga semua kendaraan terdaftar dengan baik dan masyarakat bergairah untuk memiliki kendaraan bermotor yang harganya terjangkau walaupun bekas, sehingga dengan meningkatnya pemilik kendaraan bermotor akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat, dan dengan demikian PAD juga akan meningkat.
4. Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, atau menambah jumlah outlet pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memanfaatkan jasa perbankan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Dengan banyaknya outlet pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat secara efektif dapat diterima oleh kas daerah.
6. Melaksanakan investasi pada usaha-usaha yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan berpartisipasi pada mega proyek yang ada di daerahnya sehingga dapat menambah penerimaan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, "Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia", **JEBI Vol. 16, No. 4, 2016.**
- Alfian Lains, "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru", **PRISMA, No. 4, 1985.**
- Badan Pusat Statistik, **Pendapatan Regional .Jawa Barat Tahun 2014 s/d 2018**, Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, "**Jawa Barat Dalam Angka, Tahun 2014 s/d 2018.** Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat

- Booth, Anne., “Pendanaan Pemerintah Pusat Dalam Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah”, **PRISMA nomor 1 Januari 1988, hlm. 65-78.**
- Davey K.J, 1988, **Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga**, Penerbit UI- Press.
- Departemen Dalam Negeri, 1991, **“Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab**, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk, 1989, **“Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”**, Penerbit UI-Press.
- Diah Lutfi Wijayanti, 2016 “Sektor-Sektor Ekonomi Potensial dan Pembiayaan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah : DIY”, **Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta** (tidak dipublikasikan).
- Dumairy, 1991, **“Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi**, BPFE Yogyakarta.
- Firmansyah, 2016, **Modul Pelatihan Praktis Ekonometrika, Aplikasi Econometric Views 3.0**, LSKE FE UNDIP.Gujarati, D. **Ekonometrika Dasar**, Terjemahan Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.Guritno Mangkoesoebroto, 2016, **Ekonomi Publik**,BPFE Yogyakarta.
- Hadi Sasana, 2016, “Pengaruh Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat-Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten”, **Tesis S-2 PMS UGM Yogyakarta** (tidak dipublikasikan).
- Herman Haeruman Js, “Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah”, **25 Tahun PRISMA 1971-1996.**
- H. Miyasto, “Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah”, **Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol. 2 (4) Oktober 2013.**
- Imam Ghozali, 2016. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.** Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya WK, 1996, **“Analisa Keuangan Daerah : Pendekatan Makro, Model Program PMSS ES**, Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Kaho, 1997, **“Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia”**, cetakan keempat Rajawali Press, Jakarta.
- LP2I Semarang dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2015, **“Penyusunan Data Potensi Dan Kemandirian Daerah-Daerah Propinsi Jawa Barat”.**
- Mardiasmo, 2016, **“ Otonomi Daera Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah”**
- Miller, SM dan Russek, FS, “Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level”, **Public Finance Review, Vol. 25 No. 2, March 1997, 213-237, Sage Publications, Inc.**
- “Modul : Latihan Ekonometrika Dasar”**, Program Magister Sains, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2016.

- Mudradjat Kuncoro, “Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan”, **PRISMA**, nomor 4, 1995, Jakarta.
- Mudradjat Kuncoro, 1997, “**Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan**”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Musgrave R.A and Musgrave P.B, 1993, **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- [Nota Perhitungan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggran 2013 s/d 2020.](#)
- Pemerintah Propinsi Jawa Barat, “**REPETADA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**”.
- Radianto, “Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku”, **PRISMA nomor 3, 1997**.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**.
- [....., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.](#)
- [....., Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.](#)
- [....., Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan.](#)
- Richard, L.H.Tumilar, 1997, “**Otonomi Keuangan dan Ekonomi Dati II di Propinsi Sulawesi Utara**”, Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rita Engleni, “**Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah Dalam Menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang**”, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2016.
- Sadono Sukirno, 1994, **Pengantar Teori Makroekonomi**, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2014, **Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suahasil Nazara, “Struktur Penerimaan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia”, **PRISMA, 3 Maret 1997**.
- Sugiyanto, “Kemandirian dan Otonomi Daerah”, **Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No. 1 Juni 2015**.
- Suparmoko, 2016, “**Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah**”, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Suparmoko, 1994, **Keuangan Negara : Dalan Teori dan Praktek**, BPFE Yogyakarta.
- Susiyati B. Hirawan, 1987, “**Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional : Keuangan Daerah di Indonesia**”, Badan Otonomconomica bekerjasama dengan LPFE-UI Jakarta.